



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
LKIP
2025





KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 dapat disusun dan selesai tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Akhir kata semoga LKIP ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ruteng, 26 Januari 2026

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,



LAMBERTUS PAPUT

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah bekerja di atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Di samping itu, dalam rangka evaluasi, harus disiapkan juga indikator-indikator sebagai barometer untuk menilai capaian sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dalam dokumen RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan 3 sasaran dengan 17 indikator sasaran.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi/target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun 2025 yang juga merupakan capaian kinerja pada periode perencanaan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Nilai Capaian Kinerja							
				Istimewa ($x > 100\%$)		Baik ($80\% < x \leq 100\%$)		Cukup ($60\% < x \leq 80\%$)		Kurang ($x \leq 60\%$)	
				Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%
1	Sasaran 1	4	100,43	1	25,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00
2	Sasaran 2	12	97,03	2	16,67	9	75,00	1	8,33	0	0,00
3	Sasaran 3	1	85,04	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
Jlh	3 Sasaran	17	94,17	3	17,65	13	76,47	1	5,88	0	0,00



Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran adalah 94,17% predikat kinerja **BAIK**. Ke-3 sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 17 (tujuh belas) indikator. Dari 17 (tujuh belas) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator atau 17,65% dengan predikat kinerja **ISTIMEWA**, 13 (tiga belas) indikator atau 76,46% dengan predikat kinerja **BAIK**, 1 (satu) indikator atau 5,88% dengan predikat kinerja **CUKUP**, serta predikat kinerja KURANG 0,00%

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, maka dialokasikan anggaran yang tersebar di 3 (tiga) program dan beberapa kegiatan/sub kegiatan strategis sebesar Rp5.239.249.552,00 dengan penyerapan Rp5.104.259.023,00 atau 97,42%.

Ruteng, 26 Januari 2026



PENABAT SEKRETARIS DAERAH,

LAMBERTUS PAPUT

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia Aparatur	5
E. Sistematika Penulisan LKIP	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis 2021-2026	9
1. Visi	9
2. Misi	9
3. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	10
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	19
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	21
3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya	24
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	27
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	30
3.4 Inovasi Sekretariat Daerah	68
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
3.5.1 Sumber Daya Manusia Aparatur	70
3.5.2 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025	73



3.5.3 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	73
3.5.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran	74
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN:	
1. RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi dan efektivitas. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Karenanya, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang berfungsi membantu Bupati dalam merumuskan berbagai kebijakan, harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi, tujuan atau sasaran dan program yang realistis dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pencapaian kinerja yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang tepat, jelas dan terukur agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab



serta bebas dari praktik KKN. LKIP Sekretariat Daerah tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Dalam LKIP ini akan disampaikan capaian kinerja dari masing-masing sasaran yang diukur dengan menggunakan indikatornya masing-masing. Fokus pembenahan LKIP Sekretariat Daerah pada 4 (empat) komponen kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. LKIP Sekretariat Daerah tahun 2025 juga merupakan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah **MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF**. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten. Dan ketiga Asisten itu dibantu oleh 10 (Sepuluh) Kepala Bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan/atau Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada uraian berikut.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Struktur Organisasinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Susunan organisasinya sebagai berikut:

- Sekretaris Daerah
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 4 Bagian yaitu:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Substansi Administrasi Pemerintahan;
 - b. Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Substansi Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Substansi Bina Mental Spiritual;
 - b. Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a. Substansi Perundang-Undangan;
 - b. Substansi Bantuan Hukum; dan
 - c. Substansi Dokumentasi dan Informasi.
 4. Bagian Kerja Sama, terdiri atas :
 - a. Substansi Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b. Substansi Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri; dan
 - c. Substansi Evaluasi Kerja Sama.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Substansi Perekonomian; dan

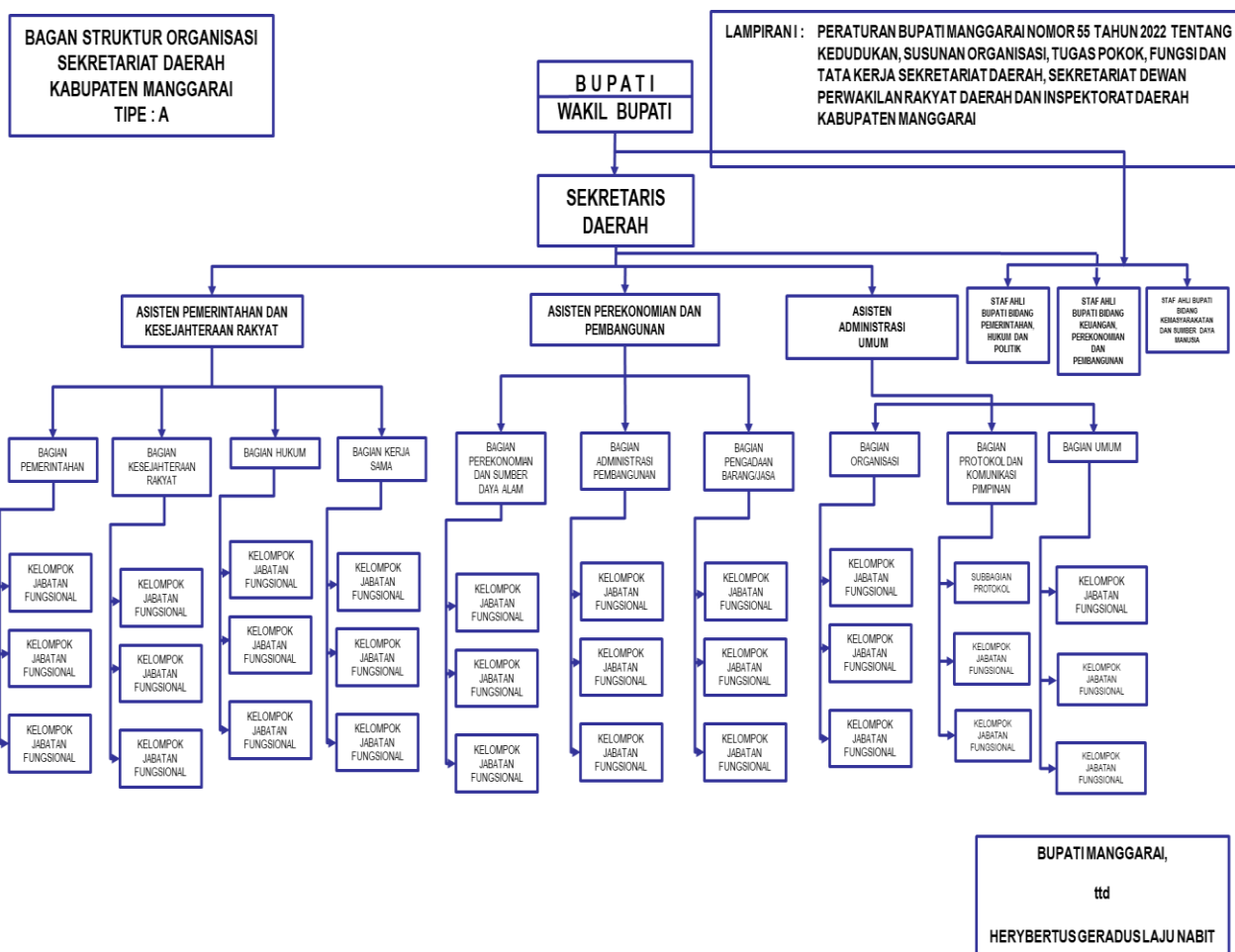


- c. Substansi Sumber Daya Alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a. Substansi Penyusunan Program;
 - b. Substansi Pengendalian Program; dan
 - c. Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :
 - a. Substansi Pengelolaan Barang/Jasa;
 - b. Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- Asisten Administrasi Umum membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Substansi Keuangan; dan
 - c. Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a. Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Protokol;
 - b. Substansi Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Substansi Dokumentasi Pimpinan.

Selain jabatan struktural tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) jabatan struktural lain yang bersifat koordinasi yaitu:

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Struktur Organisasi Setda Kabupaten Manggarai



D. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Berdasarkan struktur di atas jumlah jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berjumlah 18 jabatan dengan rincian Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) berjumlah 7 jabatan, Jabatan Administrator (eselon III) berjumlah 10 jabatan dan Jabatan Pengawas (eselon IV) berjumlah 1 jabatan. Sedangkan jumlah jabatan fungsional ahli muda hasil penyetaraan jabatan sebanyak 29 jabatan.

Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berjumlah 228 orang, dengan rincian PNS/CPNS sebanyak 114 Orang, PPPK sebanyak 91 orang dan Tenaga Honorer berjumlah 23 orang dengan komposisi sesuai pangkat/golongan dan pendidikan sebagai berikut:



a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Golongan																PPPK	Tanaga Honorer	Jml
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d			
1.	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Staf Ahli Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
a.	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	1	-	-	2	-	12
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	3	-	8
c.	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	-	-	-	4	-	12
d.	Bagian Kerja Sama	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	1	-	-	-	3	-	10
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
a.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	10
b.	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	2	-	-	-	-	1	-	11
c.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	1	-	13	2	2	2	1	-	-	-	2	-	23
5.	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
a.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	2	-	-	-	-	5	1	16
b.	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	1	2	1	-	-	-	1	-	14
c.	Bagian Umum	-	-	-	-	-	2	1	6	2	3	-	1	-	1	-	-	69	22	107
Total		0	0	0	1	0	3	6	15	44	10	6	16	5	4	4	0	91	23	228



b. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan																		Jumlah
		Pegawai Negeri Sipil						PPPK						Tenaga Honorer						
		SD	SMP	SMA	D2-D3	S1	S2	SD	SMP	SMA	D2-D3	S1	S2	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Staf Ahli Bupati	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
a.	Bagian Pemerintahan	-	-	3	1	6	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	3	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
c.	Bagian Hukum	-	-	1	1	5	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	12
d.	Bagian Kerja Sama	-	-	2	-	5	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
a.	Bagian Perekonomian dan SDA	-	1	3	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
b.	Bagian Adm. Pembangunan	-	-	3	-	7	-	-	-	1										11
c.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	1	-	20	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	23
5.	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
a.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	3	1	6	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	16
b.	Bagian Organisasi	-	-	2	2	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
c.	Bagian Umum	-	-	13	1	2	-	-	2	52	1	14	-	-	1	12	-	9	-	107
Total		0	1	34	7	71	1	0	3	60	1	27	0	0	1	12	0	10	0	228



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika Penyusunan LKIP ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Setda, komposisi sumber daya manusia aparatur dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini akan dijelaskan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2025 yang terdiri atas Rencana Strategis (RENSTRA) Setda Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2025. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2025.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2021-2026

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Dalam penyusunan Renstra tersebut, penetapan visi dan misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. VISI : **MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING**

2. MISI :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai mengemban misi ke-4 yaitu ***Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.***



3. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata lain tujuan mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas pembangunan. Di atas prioritas itulah semua program dan kegiatan serta alokasi anggaran diarahkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	Nilai SAKIP Kabupaten	61,60 (B)	63,10 (B)	64,50 (B)	66,00 (B)	67,50 (B)	68,00 (B)	68,00 (B)
	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B	39,02	48,78	58,54	68,29	73,17	85,37	85,37
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	100,00	100	100	100	100	100	100
	-	Peringkat EKPPD	NA	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,81)	Sangat Tinggi (4,21)	Sangat Tinggi (4,47)	Sangat Tinggi (4,73)	Sangat Tinggi (4,73)
	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	2.7951 (Sedang)	3.0551 (Sedang)	3.3151 (Sedang)	3.5751 (Tinggi)	3.8351 (Tinggi)	4.0951 (Tinggi)	4.0951 (Tinggi)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	99,89	99,91	99,94	99,96	99,98	100	100
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	93,00	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	49,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00
		Persentasi jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	49,19	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	35,89	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	96,00	97,00	98,00	99,00	100	100	100
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,59	80,00	81,50	82,50	83,50	84,50	84,50
	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	33,33	34,66	59,99	73,32	86,65	100	100

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: Organ.065/164/XII/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: Organ.065 /72/VIII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor: Organ.065/164/XII/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	Nilai dan Predikat hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun -1 oleh Kementerian PANRB	Bagian Organisasi
	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B	Persen	$\frac{\text{Jlh. PD yang memiliki Nilai SAKIP minimal B}}{\text{Jlh. seluruh PD}} \times 100$	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	$\frac{\text{Jlh. PD dengan Indeks Kelembagaan Efektif (Skor 61-80)}}{\text{Jlh. seluruh PD}} \times 100$	Bagian Organisasi
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	Persen	$\frac{\text{Jlh. Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi KDH/WKDH sesuai Standar}}{\text{Jlh. Seluruh Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi KDH/WKDH}} \times 100$	Bagian Prokomin
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	$\frac{\text{Jlh. pelayanan terhadap KDH/WKDH dan SEKDA yang sesuai standar}}{\text{Jlh. seluruh pelayanan terhadap KDH/WKDH dan Sekda}} \times 100$	Bagian Umum
	-	Peringkat EKPPD	Peringkat	Nilai dan Peringkat Hasil Evaluasi LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
	Meningkatnya sistem	Nilai LPPD	Nilai	Diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB
	pengendalian kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang pemerintahan}} \times 100$	Bagian Pemerintahan
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bdg. kesejahteraan rakyat}} \times 100$	Bagian Kesra
		Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	Persen	$\frac{\text{Jlh. Bansos yang disalurkan tepat sasaran}}{\text{Jlh. seluruh penyaluran bansos}} \times 100$	Bagian Kesra
		Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	Persen	$\frac{\text{Jlh. produk hukum daerah yang tidak dibatalkan}}{\text{Jlh. seluruh produk hukum yang diusulkan}} \times 100$	Bagian Hukum
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	$\frac{\text{Jlh. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani}}{\text{Jlh. Perjanjian Kerja Sama yang diprakarsai}} \times 100$	Bagian Kerja Sama
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang perekonomian}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan SDA
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang pembangunan}} \times 100$	Bagian Adm. Pembangunan



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	$\frac{\text{Jlh. pengadaan yang menggunakan e-Procurement}}{\text{Jlh. seluruh pengadaan}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Persentasi jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	$\frac{\text{Jlh. pengadaan yang dilakukan dgn metode kompetitif}}{\text{Jlh. Seluruh pengadaan}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	$\frac{\text{Jlh. Nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	$\frac{\text{Jlh. persoalan pengelolaan SDA yang diselesaikan sesuai ketentuan}}{\text{Jlh. seluruh persoalan pengelolaan SDA}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan SDA
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Pemkab Manggarai	Bagian Organisasi
	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	$\frac{\text{Jlh. Perangkat Daerah Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM minimal baik}}{\text{Jlh. seluruh Perangkat Daerah Pelayanan Publik}} \times 100$	Bagian Organisasi



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan Setda untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Setda bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud sebagai hasil (*impact*) dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*by design and sustainable*). Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 yang disajikan dalam laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan (Renstra) 2021-2026. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target



kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 dimaksud, sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	67,50 (B)
1.1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	73,17
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00
	-	Peringkat EKKPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)
1.2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.8351 (Tinggi)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	Persen	90,00
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	100,00
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50
2.1	Meningkatnya sistem pengenda-lian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	86,65

Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah = 10 Inovasi

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	3.374.505.818,00	APBD-P
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.474.022.386,00	APBD-P
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	390.721.348,00	APBD-P
Jumlah Anggaran pada Program/Kegiatan Strategis		5.239.249.552,00	APBD-P
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Pendukung)		16.604.884.635,00	APBD-P
TOTAL ANGGARAN PERUBAHAN SETDA TA. 2025		21.844.134.187,00	APBD-P



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai menyusun LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 maupun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan



subkegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan



		sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (bila ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	67,50 (B)	64,81 (B)	96,01
1.1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	73,17	74,42	101,71
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 1					100,43
	Predikat Kinerja				ISTIMEWA	
		Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)	2,8113 (Sedang)	62,89
1.2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.8351 (Tinggi)	2.8113 (Sedang)	73,30
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	90,00	98,97	109,97
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	48,16	80,27
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,38	100,85
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	100	100,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 2					97,03
	Predikat Kinerja					BAIK
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50	85,10	101,92
2.1	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	86,65	73,68	85,04
	Rata-rata Sasaran 3					85,04
	Kategori					BAIK
RATA-RATA SASARAN 1 + 2 + 3						94,17
PREDIKAT KINERJA						BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas terdapat capaian indikator tujuan yang melebihi target sebanyak 1 indikator atau 33,33% dan capaian indikator tujuan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator atau 66,67%.

Sementara hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator atau 17,65% yang melebihi target, capaian indikator sasaran yang sesuai target sebanyak 11 (sebelas) indikator atau 64,71% dan capaian indikator sasaran yang tidak mencapai target sebanyak 3 indikator atau 17,65%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

No	Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Persentase
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33,33
2	Sesuai Target	0	0,00
3	Tidak Mencapai Target	2	66,67
Jumlah		3	100,00

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

No	Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Persentase
1	Melebihi/Melampaui Target	3	17,65
2	Sesuai Target	11	64,71
3	Tidak Mencapai Target	3	17,65
Jumlah		17	100,00

3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut:



Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	66,00 (B)	64,81 (B)	98,20	67,50 (B)	64,81	96,01
Sasaran 1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29	69,77	102,16	73,17	74,42	101,71
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan kepro-tokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 1					100,54			100,43
Predikat Kinerja Sasaran 1				ISTIMEWA			ISTIMEWA		
-	-	Peringkat EKPPD	Peringkat	4,21 (Sangat Tinggi)	2,9317 (Sedang)	69,64	Sangat Tinggi (4,47)	2,8113 (Sedang)	62,89
Sasaran 2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00	3.8351 (Tinggi)	2.8113 (Sedang)	73,30
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00	97,71	122,13	90,00	98,97	109,97
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	53,82	89,71	60,00	48,16	80,27
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,02	100,05	45,00	45,38	100,85
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00	100,00
		Rata-rata Sasaran 2				99,58			97,03
		Predikat Kinerja Sasaran 2				BAIK			BAIK
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	86,21	104,50	83,50	85,10	101,92



No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32	68,42	93,32	86,65	73,68	85,04
Rata-rata Sasaran 3						93,32			85,04
Predikat Kinerja Sasaran 3						BAIK			BAIK
RATA-RATA SASARAN 1 + 2 + 3						97,81			94,17
PREDIKAT KINERJA SASARAN 1 + 2 + 3						BAIK			BAIK

Tabel 3.4 tersebut di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 mencapai 94,17% dengan predikat kinerja BAIK. Capaian kinerja 94,17% tahun 2025 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 97,81% dengan predikat kinerja BAIK.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	67,50 (B)	64,81	96,01	68,00 (B)	95,31
Sasaran 1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	73,17	74,42	101,71	85,37	87,17



No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Rata-rata Sasaran 1				100,43		96,79
		Predikat Kinerja Sasaran 1			ISTIMEWA			BAIK
-	-	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)	2,8113 (Sedang)	62,89	4,73 (Sangat Tinggi)	59,44
Sasaran 2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.8351 (Tinggi)	2.8113 (Sedang)	73,30	4.0951 (Tinggi)	68,65
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	90,00	98,97	109,97	90,00	109,97
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	48,16	80,27	60,00	80,27
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,38	100,85	50,00	90,76
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 2					97,03		95,80
	Kategori Sasaran 2					BAIK		BAIK
	Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50	85,10	101,92	84,50
Sasaran 3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	86,65	73,68	85,04	100,00	73,68
	Rata-rata Sasaran 3					85,04		73,68
	Predikat Kinerja Sasaran 3					BAIK		CUKUP
RATA-RATA SASARAN 1 + 2 + 3						94,17		88,76
PREDIKAT KINERJA SASARAN 1 + 2 + 3						BAIK		BAIK

Tabel 3.5 tersebut di atas menginformasikan bahwa realisasi indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja sebesar 88,76% dengan Predikat Kinerja BAIK.



3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

TUJUAN 1

MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Indikator : Nilai SAKIP Kabupaten

Indikator : Peringkat EKPPD

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui 2 (dua) IKU dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar **79,45%** dengan predikat kinerja **CUKUP**, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai **90,10%** predikat kinerja **BAIK**. Penurunan ini selain karena target dari kedua indikator kinerja tujuan tersebut cukup tinggi pada tahun 2025 juga karena realisasi dari Indikator Peringkat EKPPD tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Uraian dari kedua indikator tujuan tersebut sebagai berikut:

Indikator Tujuan Nilai SAKIP Kabupaten

Target 67,50 (B) → Realisasi 64,81 (B) → Capaian Kinerja 96,01% → Predikat **BAIK**

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai yang kami sajikan disini adalah nilai SAKIP tahun 2024 karena sampai dengan selesainya penyusunan LKIP ini, Kementerian PANRB belum menyampaikan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB sesuai Surat Nomor B/358/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 64,81 dengan predikat **"B"**. Rincian hasil evaluasi tersebut, sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	21,58	21,69
2	Pengukuran Kinerja	30	17,15	17,24
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,21
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,60	15,67
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,38	64,81
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2024



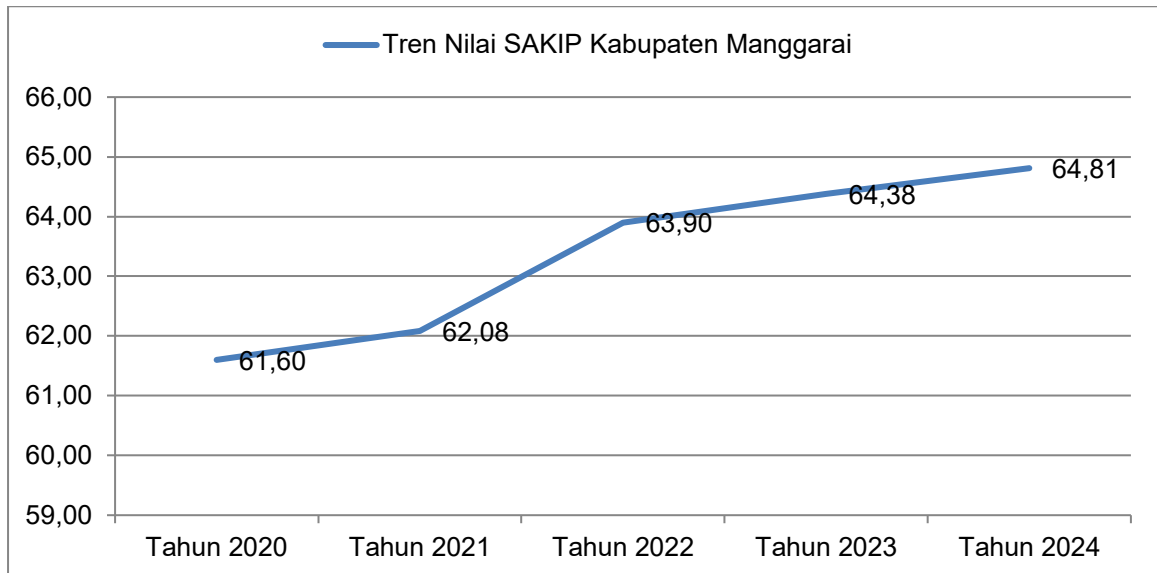
Tabel 3.6
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2024

No	Instansi Pemerintah	Nilai	Predikat	Interpretasi
I	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	63,69	B	BAIK
1	Pemerintah Kabupaten Manggarai	64,81	B	BAIK
2	Pemerintah Kota Kupang	64,07	B	BAIK
3	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	62,29	B	BAIK
4	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	61,31	B	BAIK
5	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	60,96	B	BAIK
6	Pemerintah Kabupaten Sikka	60,79	B	BAIK
7	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	60,65	B	BAIK
8	Pemerintah Kabupaten Belu	60,55	B	BAIK
9	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	60,49	B	BAIK
10	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	60,30	B	BAIK
11	Pemerintah Kabupaten Ende	60,29	B	BAIK
12	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	60,14	B	BAIK
13	Pemerintah Kabupaten Alor	60,10	B	BAIK
14	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	60,10	B	BAIK
15	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	60,09	B	BAIK
16	Pemerintah Kabupaten Ngada	60,09	B	BAIK
17	Pemerintah Kabupaten Lembata	60,08	B	BAIK
18	Pemerintah Kabupaten Kupang	56,58	CC	CUKUP
19	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	55,27	CC	CUKUP
20	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	52,22	CC	CUKUP
21	Pemerintah Kabupaten Malaka	51,44	CC	CUKUP
22	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	50,04	CC	CUKUP

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2024 dirangkum oleh Biro Organisasi Setda Prov. NTT

Sesuai tabel 3.6 tersebut di atas, nilai AKIP Kabupaten Manggarai tahun 2024 menempati Peringkat **ke-1** dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai AKIP Kabupaten Manggarai terus mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak signifikan yaitu dari 61,60 tahun 2020 menjadi 64,81 pada tahun 2024 dengan predikat yang sama yaitu B. Predikat B menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "BAIK" yaitu implementasi SAKIP sudah baik di Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Adapun tren nilai AKIP Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2020-2024 seperti pada grafik berikut:



Sumber : LHE Kementerian PANRB

Faktor penyebab keberhasilan ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan beberapa perbaikan terkait kualitas rumusan kinerja melalui perbaikan pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
2. Menyusun rencana aksi di seluruh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam memantau progres realisasi atas target yang diperjanjikan oleh setiap Perangkat Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah dengan melakukan penguatan informasi yang perlu disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah.
4. Mengunggah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah pada website Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
5. Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan evaluasi AKIP internal dengan memperluas jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh tim evaluator internal.
6. Seluruh Perangkat Daerah yang dievaluasi telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal.



Faktor penghambat keberhasilan sebagai berikut:

1. Beberapa rumusan kinerja di level Pemerintah Daerah yang dituangkan pada dokumen perencanaan kinerja belum didukung dengan indikator kinerja yang relevan dan cukup.
2. Beberapa rumusan kinerja di level Perangkat Daerah memiliki indikator kinerja belum relevan dengan sasaran strategis yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada rencana aksi masih berorientasi pada penyerapan anggaran sehingga hasil pelaksanaannya belum diketahui tingkat ketercapaian dan kualitasnya.
4. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan analisis faktor keberhasilan atau kegagalan yang mempengaruhi realisasi kinerja, analisis atas program maupun kegiatan yang mempengaruhi kinerja, serta hasil analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan guna mencapai realisasi kinerja.
5. Laporan hasil evaluasi belum menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah sehingga belum mampu memberikan perbaikan yang signifikan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah.

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan nilai AKIP Kabupaten Manggarai:

1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang terdapat dalam LHE baik LHE dari Kementerian PANRB maupun LHE AKIP Internal Perangkat Daerah.
2. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral dan bekerja secara tim.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melalui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
4. Melakukan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah secara terus menerus, khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian Perangkat Daerah Kecamatan memahami SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.



5. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang andal serta berbasis teknologi informasi melalui aplikasi <https://sakup.manggarai.go.id>

Indikator Tujuan Peringkat EKPPD

Target 4,47 (Sangat Tinggi) → Realisasi 2,8113 (Sedang) → Capaian Kinerja 62,89 % → Predikat Kinerja **CUKUP**

Realisasi indikator Peringkat EKPPD tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai tahun 2023.

Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kabupaten Manggarai memperoleh Skor **2,8113** Status Kinerja **SEDANG** dan menempati peringkat ke-230 dari 395 kabupaten seluruh Indonesia. Sementara pada tahun sebelumnya Kabupaten Manggarai memperoleh skor **2,9317** status kinerja **SEDANG** dan menempati peringkat 174 dari 414 Kabupaten seluruh Indonesia.

Sedangkan skor dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 seperti yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2025

KABUPATEN/KOTA	STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA
Pemerintah Provinsi NTT	2,3002	Rendah
1 Kota Kupang	3,0499	Sedang



KABUPATEN/KOTA		STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
		SKOR KINERJA	STATUS KINERJA
2	Lembata	2,9555	Sedang
3	Manggarai Timur	2,8504	Sedang
4	Manggarai	2,8113	Sedang
5	Timor Tengah Utara	2,6224	Sedang
6	Kupang	2,5725	Rendah
7	Manggarai Barat	2,5524	Rendah
8	Nagekeo	2,4922	Rendah
9	Ende	2,4668	Rendah
10	Ngada	2,4474	Rendah
11	Sumba Barat	2,3767	Rendah
12	Flores Timur	2,3588	Rendah
13	Sabu Raijua	2,3426	Rendah
14	Sikka	2,2659	Rendah
15	Rote Ndao	2,1933	Rendah
16	Sumba Tengah	2,1694	Rendah
17	Alor	2,1127	Rendah
18	Timor Tengah Selatan	2,0067	Rendah
19	Belu	1,8243	Rendah
20	Sumba Timur	1,6077	Sangat Rendah
21	Malaka	1,3786	Sangat Rendah
22	Sumba Barat Daya	Nihil	Nihil

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025

Sesuai tabel 3.7 tersebut di atas, Kabupaten Manggarai menempati urutan **ke-4** dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menempati peringkat ke-230 dari 395 kabupaten seluruh Indonesia.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai berfluktuatif seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		Keterangan
		Skor Kinerja	Status Kinerja	
1	2	3	4	5
1	2022	2,7951	Tinggi	Hasil Penilaian Evaluasi dari



No	Tahun	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		Keterangan
		Skor Kinerja	Status Kinerja	
1	2	3	4	5
				Kemendagri atas LPPD Tahun 2018
2	2023	2,16	Rendah	Hasil Penilaian Evaluasi dari Kemendagri Tahun 2022 atas LPPD Tahun 2021
3	2024	2,9317	Sedang	Hasil Penilaian Evaluasi dari Kemendagri Tahun 2023 atas LPPD Tahun 2022
4	2025	2,8113	Sedang	Hasil Penilaian Evaluasi dari Kemendagri Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023

Beberapa permasalahan/hambatan dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai, antara lain:

1. Adanya perubahan regulasi/peraturan terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara dokumen/laporan yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya yang menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya.
3. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.

Strategi dan/atau Solusi dalam mengatasi kendala dalam capaian kinerja:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait pengumpulan data dan penyusunan Laporan.



Dalam pencapaian tujuan **Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**, didukung oleh 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu:

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran tersebut di atas diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29	69,77	102,16	73,17	74,42	101,71
2	Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan terhdp KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata					100,54			100,43
Predikat Kinerja			ISTIMEWA			ISTIMEWA		

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada tahun 2025 adalah 100,43%, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 100,54% dengan predikat kinerja yang sama yaitu **ISTIMEWA**. Penurunan ini antara lain disebabkan karena angka target dari salah satu indikator meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun uraian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B

Realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2025 adalah 74,42% dari target yang telah diperjanjikan sebesar 73,17% dengan nilai capaian kinerja 101,715 predikat kinerja **ISTIMEWA**. Realisasi 74,42% diperoleh dari jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal B sebanyak 32 PD/Unit Kerja dari total 43 PD/Unit Organisasi. Realisasi ini meningkat dari



tahun 2024. Tahun 2024 jumlah PD/Unit Organisasi yang nilai AKIP-nya minimal B sebanyak 30 PD/Unit Organisasi.

Tabel 3.10
Nilai dan Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI SAKIP		TAHUN EVALUASI
		NILAI	PREDIKAT	
1	Sekretariat Daerah	85,80	A	2025
2	Sekretariat DPRD	84,10	A	2025
3	Inspektorat Daerah	88,50	A	2025
4	Dinas Kesehatan	84,90	A	2025
5	Dinas Perikanan	81,55	A	2025
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	84,15	A	2025
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	84,15	A	2025
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	85,80	A	2025
9	Dinas Perhubungan	85,05	A	2025
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,00	A	2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	85,50	A	2025
12	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	83,30	A	2025
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,15	A	2025
14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	78,30	BB	2025
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	75,15	BB	2025
16	Dinas Sosial	75,60	BB	2025
17	Dinas Peternakan	79,50	BB	2025
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73,20	BB	2025
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76,35	BB	2025
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	77,65	BB	2025
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79,50	BB	2025
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	79,20	BB	2025
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,15	BB	2025
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,30	BB	2025
25	Dinas Lingkungan Hidup	72,80	BB	2025
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	77,95	BB	2025
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,40	BB	2025
28	Badan Pendapatan Daerah	76,20	BB	2025
29	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	76,20	BB	2025
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	77,35	BB	2025



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI SAKIP		TAHUN EVALUASI
		NILAI	PREDIKAT	
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	72,15	BB	2025
32	Kecamatan Langke Rembong	63,25	B	2022
33	Kecamatan Wae Ri'i	Belum dievaluasi		
34	Kecamatan Cibal	Belum dievaluasi		
35	Kecamatan Cibal Barat	Belum dievaluasi		
36	Kecamatan Reok	Belum dievaluasi		
37	Kecamatan Reok Barat	Belum dievaluasi		
38	Kecamatan Satar Mese	Belum dievaluasi		
39	Kecamatan Satar Mese Barat	Belum dievaluasi		
40	Kecamatan Satar Mese Utara	Belum dievaluasi		
41	Kecamatan Lelak	Belum dievaluasi		
42	Kecamatan Ruteng	Belum dievaluasi		
43	Kecamatan Rahong Utara	Belum dievaluasi		
Jumlah seluruh PD/Unit Organisasi		43 PD/Unor		
Jumlah PD/Unor yang sudah dievaluasi		32 PD/Unor		
Jumlah PD/Unor yang belum dievaluasi		11 PD/Unor		
Jumlah PD/Unor yang sudah dievaluasi dan memperoleh nilai AKIP minimal B		32 PD/Unor		
Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP Minimal B		32/43*100 = 74,42%		

Sumber : Inspektorat dan diolah oleh Bagian Organisasi Setda, 2025

Dari tabel tersebut di atas, terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang nilai AKIP-nya mengalami peningkatan hasil evaluasi tahun 2025, yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari Nilai/Predikat CC tahun 2024 menjadi nilai/predikat BB tahun 2025.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dari Nilai/Predikat C tahun 2024 menjadi nilai/predikat BB tahun 2025.

Peningkatan nilai dari kedua Perangkat Daerah tersebut antara lain disebabkan karena kedua PD tersebut telah menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE AKIP Internal tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut kami sajikan realisasi capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B dalam kurun waktu 2022-2025 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah
yang memiliki nilai SAKIP minimal B
Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Jlh. PD/Unor	Jlh. PD/Unor dengan Nilai AKIP Minimal B	Persentase
1	2022	43	28	65,12
2	2023	43	32	74,42
3	2024	43	30	69,77
4	2025	43	32	74,42

Sumber : LHE AKIP Inspektorat Daerah, diolah Bagian Organisasi Setda, 2025

Dari tabel 3.11 tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B, berfluktuatif dari 65,12% tahun 2022 menjadi 74,42% tahun 2023, turun menjadi 69,77% tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 74,42% tahun 2025.

Setiap tahun, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melakukan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara sampling. Pada tahun 2025, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi terhadap 31 Perangkat Daerah dengan rata-rata nilai hasil evaluasi tersebut adalah 79,77% kategori BB atau SANGAT BAIK.

Tabel 3.12
Perangkat Daerah Sampel Evaluasi SAKIP
Tahun 2022-2025

No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel		Kinerja		Kategori
				%	Nilai	
1	2	3		4	5	6
1	2022	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,70	69,70	B
		2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	68,45	68,45	B
		3	Dinas Lingkungan Hidup	69,70	69,70	B
		4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	67,85	67,85	B
		5	Dinas Sosial	67,85	67,85	B
		6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66,30	66,30	B
		7	Dinas Perikanan	66,85	66,85	B
		8	Dinas Peternakan	66,85	66,85	B
		9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	66,85	66,85	B
		10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	66,40	66,40	B



No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel		Kinerja		Kategori
				%	Nilai	
1	2	3		4	5	6
		11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67,60	67,60	B
		12	Dinas Perhubungan	67,85	67,85	B
		13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66,85	66,85	B
		14	Dinas Komunikasi dan Informatika	72,25	72,25	BB
		15	Sekretariat DPRD	69,10	69,10	B
		16	Bappelitbangda	63,25	63,25	B
		17	BPBD	66,85	66,85	B
		18	BKPSDMD	66,35	66,35	B
		19	RSUD Ruteng	67,85	67,85	B
		20	Kec. Langke Rembong	63,25	63,25	B
Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2022				67,40	67,40	B
2	2023	1	Sekretariat Daerah	70,70	70,70	BB
		2	Inspektorat Daerah	60,75	60,75	B
		3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	74,25	74,25	BB
		4	Dinas Kesehatan	62,25	62,25	B
		5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,25	75,25	BB
		6	Dinas Sosial	75,00	75,00	BB
		7	Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan	71,45	71,45	BB
		8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65,55	65,55	B
		9	Dinas Perikanan	67,70	67,70	B
		10	Dinas Peternakan	69,30	69,30	B
		11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67,85	67,85	B
		12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	78,55	78,55	BB
		13	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	65,85	65,85	B
		14	Dinas PMPTSP	67,90	67,90	B
		15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71,90	71,90	BB
		16	Dinas Komunikasi dan Informatika	76,50	76,50	BB
		17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	70,85	70,85	BB
		18	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	65,75	65,75	B
		19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63,60	63,60	B
		20	BAPPERIDA	74,08	74,08	BB
		21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	69,80	69,80	B
		22	Badan Pendapatan Daerah	73,20	73,20	BB
		23	BKPSDMD	78,10	78,10	BB
Rata-Rata Evaluasi Tahun 2023				70,27	70,27	BB
3	2024	1	Sekretariat Daerah	78,95	78,95	BB
		2	Sekretariat DPRD	71,10	71,10	BB
		3	Inspektorat Daerah	88,50	88,50	A
		4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	74,10	74,10	BB
		5	Dinas Kesehatan	69,35	69,35	B
		6	Dinas PUPR	75,55	75,55	BB



No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel		Kinerja		Kategori		
				%	Nilai			
1	2	3		4	5	6		
		7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,90	77,90	BB		
		8	Satuan POLPP dan Pemadam Kebakaran	58,95	58,95	CC		
		9	Dinas Sosial	77,85	77,85	BB		
		10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76,80	76,80	BB		
		11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,30	66,30	B		
		12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73,10	73,10	BB		
		13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	69,80	69,80	B		
		14	Dinas Lingkungan Hidup	67,90	67,90	B		
		15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,50	72,50	BB		
		16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,70	72,70	BB		
		17	Dinas Perhubungan	72,75	72,75	BB		
		18	Dinas Komunikasi dan Informatika	73,55	73,55	BB		
		19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73,10	73,10	BB		
		20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75,45	75,45	BB		
		21	Dinas Perikanan	70,30	70,30	BB		
		22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69,85	69,85	B		
		23	Dinas Peternakan	70,00	70,00	B		
		24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72,85	72,85	BB		
		25	BAPPERIDA	74,75	74,75	BB		
		26	BKPSDMD	82,05	82,05	A		
		27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	70,15	70,15	BB		
		28	Badan Pendapatan Daerah	73,65	73,65	BB		
		29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	49,65	49,65	C		
		30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,75	68,75	B		
		31	RSUD RUTENG	74,70	74,70	BB		
		Rata-Rata Evaluasi Tahun 2024				72,35	72,35	BB
		4	2025	1	Sekretariat Daerah	85,80	85,80	A
				2	Sekretariat DPRD	84,10	84,10	A
				3	Inspektorat Daerah	88,50	88,50	A
				4	Dinas Kesehatan	84,90	84,90	A
				5	Dinas Perikanan	81,55	81,55	A
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			84,15	84,15	A		
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			84,15	84,15	A		
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			85,80	85,80	A		
9	Dinas Perhubungan			85,05	85,05	A		
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			81,00	81,00	A		
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			85,50	85,50	A		



No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel		Kinerja		Kategori
				%	Nilai	
1	2	3		4	5	6
		12	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	83,30	83,30	A
		13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,15	81,15	A
		14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	78,30	78,30	BB
		15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	75,15	75,15	BB
		16	Dinas Sosial	75,60	75,60	BB
		17	Dinas Peternakan	79,50	79,50	BB
		18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73,20	73,20	BB
		19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76,35	76,35	BB
		20	Dinas Komunikasi dan Informatika	77,65	77,65	BB
		21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79,50	79,50	BB
		22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	79,20	79,20	BB
		23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,15	78,15	BB
		24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,30	77,30	BB
		25	Dinas Lingkungan Hidup	72,80	72,80	BB
		26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	77,95	77,95	BB
		27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,40	75,40	BB
		28	Badan Pendapatan Daerah	76,20	76,20	BB
		29	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	76,20	76,20	BB
		30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	77,35	77,35	BB
		31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	72,15	72,15	BB
Rata-Rata Evaluasi Tahun 2025				79,77	79,77	BB

Sumber: Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda, 2025

Rata-rata hasil evaluasi tahun 2025 terhadap penerapan SAKIP untuk 31 Perangkat Daerah tahun 2024 yang mencapai 79,77 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,35 kategori yang sama yaitu BB.

Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai dan kategori SAKIP ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga melakukan Bimbingan Teknis, seperti:

- 1) Dengan *SmartID* Universitas Brawijaya Malang melaksanakan BIMTEK Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Via *Zoom Meeting*;
- 2) Dengan BPKp Perwakilan NTT melaksanakan BIMTEK Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh Para Sekretaris, Kasubag. Perencanaan dan Keuangan/PEP/ Fungsional Perencana dari setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. Selain BIMTEK tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Organisasi Setda terus melakukan pendampingan/asistensi saat penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah.



Faktor Penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP, antara lain:

1. Batas waktu penyusunan dokumen/laporan SAKIP yang singkat sementara dokumen yang disusun tidak hanya dokumen/laporan SAKIP namun juga laporan-laporan lainnya yang menyebabkan laporan dan data yang disajikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya.
2. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah terkait penerapan dan penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah.
3. SDM Aparatur pada Subbagian Perencanaan/Fungsional Perencana sangat terbatas.



2. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.



Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 melalui Bagian Organisasi Setda telah melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. Dari hasil evaluasi tersebut seluruh Perangkat Daerah berada di atas Peringkat Komposit 4 (P-4) atau berada pada Peringkat Komposit 5 (P-5) dengan skor 81-100. Peringkat komposit P-5 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong **Sangat Efektif**. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Dengan demikian, realisasi dari indikator sasaran ini masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2023, dimana seluruh Perangkat Daerah yang dievaluasi berada di atas Peringkat Komposit 4 (P-4) atau berada pada Peringkat Komposit 5 (P-5) dengan skor 81-100.

Tabel 3.13
Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai
Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PERINGKAT KOMPOSIT	KATEGORI
1	Sekretariat Daerah	94,375	Sangat Efektif
2	Sekretariat DPRD	94,375	Sangat Efektif
3	Inspektorat Daerah	94,375	Sangat Efektif
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	94,375	Sangat Efektif
5	Dinas Kesehatan	92,75	Sangat Efektif
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94,375	Sangat Efektif
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	93,03	Sangat Efektif
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	83,996	Sangat Efektif
9	Dinas Sosial	93,106	Sangat Efektif
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,375	Sangat Efektif
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94,375	Sangat Efektif
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,375	Sangat Efektif
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	94,375	Sangat Efektif
14	Dinas Lingkungan Hidup	94,375	Sangat Efektif
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,375	Sangat Efektif



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PERINGKAT KOMPOSIT	KATEGORI
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88,863	Sangat Efektif
17	Dinas Perhubungan	94,375	Sangat Efektif
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,601	Sangat Efektif
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	94,375	Sangat Efektif
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94,375	Sangat Efektif
21	Dinas Perikanan	94,375	Sangat Efektif
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	94,375	Sangat Efektif
23	Dinas Peternakan	94,375	Sangat Efektif
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94,375	Sangat Efektif
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	94,375	Sangat Efektif
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	83,996	Sangat Efektif
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	88,863	Sangat Efektif
28	Badan Pendapatan Daerah	94,375	Sangat Efektif
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	94,375	Sangat Efektif
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94,375	Sangat Efektif
31	RSUD dr. Ben Mboi	94,375	Sangat Efektif
32	Kecamatan Langke Rembong	88,863	Sangat Efektif
33	Kecamatan Ruteng	88,863	Sangat Efektif
34	Kecamatan Wae Ri'i	88,863	Sangat Efektif
35	Kecamatan Cibal	88,863	Sangat Efektif
36	Kecamatan Reok	88,863	Sangat Efektif
37	Kecamatan Satar Mese	88,863	Sangat Efektif
38	Kecamatan Satar Mese Barat	88,863	Sangat Efektif
39	Kecamatan Lelak	88,863	Sangat Efektif
40	Kecamatan Rahong Utara	88,863	Sangat Efektif
41	Kecamatan Cibal Barat	88,863	Sangat Efektif
42	Kecamatan Reok Barat	88,863	Sangat Efektif
43	Kecamatan Satar Mese Utara	88,863	Sangat Efektif
Jumlah Total		3945,186	
Rata-rata		91,7485	Sangat Efektif

3. Indikator Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai Standar

Salah satu tugas dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. Kegiatan yang difasilitasi terkait pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan antara lain pada saat Bupati dan Wakil Bupati melakukan kunjungan kerja baik dalam wilayah Kabupaten Manggarai



maupun di luar wilayah Kabupaten Manggarai, pada saat Bupati dan Wakil Bupati melakukan dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat, pada saat penerimaan tamu pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kegiatan pelayanan kepada Bupati dan Wakil Bupati tersebut semuanya telah difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan telah memenuhi standar (SOP). Dengan demikian capaian dari indikator sasaran ini adalah 100% dari yang ditargetkan.

4. Indikator Persentase Pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang Sesuai Standar

Tugas pokok dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum Setda kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah antara lain terkait Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tahun 2025 Bagian Umum Setda telah melaksanakan tugas pelayanan tersebut sesuai standar (SOP), dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	73,17	74,42	101,71	85,37	87,17
2	Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	9
	standar						
Rata-rata					100,43		96,79
Predikat Kinerja				ISTIMEWA			BAIK

Realisasi tahun 2025 ini dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 maka rata-rata capaiannya adalah 96,79% predikat kinerja **BAIK**.

Sasaran "**Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja**" tersebut dicapai melalui program/Kegiatan sebagai berikut :

Bagian Organisasi, Bagian Prokompim dan Bagian Umum				
No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.340.345.818,00	3.298.128.299,00	98,74
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.005.500,00	12.005.500,00	100,00
2	Kegiatan Penataan Organisasi	190.845.600,00	190.695.600,00	99,92
3	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	911.278.496,00	907.440.116,00	99,58
4	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.049.000.000,00	2.047.500.040,00	99,93
5	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	177.216.222,00	140.487.043,00	79,27
Total Anggaran		3.340.345.818,00	3.298.128.299,00	98,74

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja** sebesar Rp3.340.345.818,00 realisasi Rp3.298.128.299,00 atau 98,74%.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA SISTEM PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.15

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00	3.8351 (Tinggi)	2.8113 (Sedang)	73,30
2	Persentase usulan kebijakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti							
3	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00	97,71	122,13	90,00	98,97	109,97
10	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	53,82	89,71	60,00	48,16	80,27
11	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,02	100,05	45,00	45,38	100,85
12	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00	100,00
Rata-Rata					99,58			97,03
Kategori					BAIK			BAIK

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada tahun 2025 adalah 97,03% predikat kinerja BAIK, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 99,58% dengan predikat kinerja BAIK. Adapun uraian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indikator Nilai LPPD

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja



urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nilai LPPD Kabupaten Manggarai sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah **2,8113** status kinerja **Sedang**. Nilai dan status kinerja ini turun dari hasil penilaian tahun sebelumnya yaitu **2,9317** Status Kinerja **Sedang**.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja:

1. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara dokumen/laporan yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya yang menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya.
2. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.

Strategi dan/atau Solusi dalam mengatasi kendala dalam capaian kinerja:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait pengumpulan data dan penyusunan Laporan.

2. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti

Bagian Pemerintahan Setda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang **administrasi pemerintahan**, **administrasi kewilayahan** dan **otonomi Daerah**.



Pada tahun 2025, usulan kebijakan bidang pemerintahan terkait urusan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah telah ditindaklanjuti oleh Bagian Pemerintahan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian kinerja 100%. Capaian ini sama dengan tahun 2024 predikat kinerja BAIK.

3. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2025 Bagian Kesejahteraan Rakyat telah menindaklanjuti usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan bidang keagamaan terkait pemberian bantuan ke Gereja/Kapela, Masjid dan/atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, kebijakan bidang kesejahteraan sosial seperti bantuan ke rumah gendang dan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat seperti bantuan berobat bagi masyarakat kurang mampu, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2025 mencapai 100% dengan predikat kinerja BAIK sama dengan capaian pada tahun 2024.

4. Indikator Persentase Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya **risiko sosial**.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sebanyak 28 bantuan dengan rincian bantuan sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sebanyak 24 bantuan dengan total nilai bantuan sebesar Rp500.000.000,00 dan bantuan sosial bersifat orang per orang sebanyak 4 (empat) bantuan dengan total nilai



bantuan sebesar Rp27.500.000,00. Ke-28 bantuan ini semuanya tepat sasaran atau mencapai 100,00% predikat kinerja ISTIMEWA.

Tabel 3.16
Data Bantuan Sosial
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)		Jumlah Bantuan (Rp.)
		Bantuan Perorangan	Kelompok Masyarakat	
1	2022	148.500.000,00	600.000.000,00	748.500.000,00
2	2023	42.000.000,00	825.000.000,00	867.000.000,00
3	2024	65.000.000,00	1.202.500.000,00	1.267.500.000,00
4	2025	27.500.000,00	500.000.000,00	527.500.000,00
Total		283.000.000,00	3.127.500.000,00	3.410.500.000,00

Sumber : Bagian Kesra Setda, 2025

5. Indikator Persentase Produk Hukum Yang Tidak Dibatalkan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah RANPERDA yang diusulkan oleh Eksekutif kepada Legislatif/DPRD. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengajukan 5 (Lima) RANPERDA untuk dibahas bersama DPRD dan hasilnya ke-5 RANPERDA tersebut diterima dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai. Berdasarkan uraian tersebut, maka realisasi dan capaian indikator sasaran ini adalah 100% Predikat Kinerja BAIK.

Tabel 3.17
RANPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	RANPERDA	PERDA	KET
PENETAPAN TAHUN 2022			
1	Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ditetapkan
2	Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Ditetapkan



No	RANPERDA	PERDA	KET
3	Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021	Ditetapkan
4	Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Ditetapkan
5	Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Ditetapkan
6	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Ditetapkan
PENETAPAN TAHUN 2023			
1	Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Ditetapkan
2	Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai	Ditetapkan
3	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Ditetapkan
4	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Ditetapkan
5	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024	Ditetapkan
6	Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai	Ditetapkan
PENETAPAN TAHUN 2024			
1	Tentang Rencana Tata Ruang	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun	Ditetapkan



No	RANPERDA	PERDA	KET
	Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043	2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043	
2	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Ditetapkan
3	Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025-2045	Ditetapkan
4	Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Ditetapkan
5	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ditetapkan
6	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Ditetapkan
PENETAPAN TAHUN 2025			
1	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Ditetapkan
2	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Ditetapkan
3	Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Ditetapkan
4	Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ditetapkan
5	Tentang APBD Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang APBD Tahun Anggaran	Ditetapkan



No	RANPERDA	PERDA	KET
		2026	

Sumber: Bagian Hukum Setda, 2025

6. Indikator Persentase Perjanjian Kerja Sama Yang Ditandatangani

Kerja Sama Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pada tahun 2025, realisasi indikator sasaran ini mencapai 100%, dimana Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menandatangani perjanjian kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan antara daerah dengan pihak ketiga sebanyak 33 PKS/MoU. Sementara pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran ini juga mencapai 100%, dimana Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menandatangani perjanjian kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan antara daerah dan pihak ketiga sebanyak 14 PKS/MoU dari 14 PKS/MoU yang diprakarsai.

Tabel 3.18
Data Perjanjian Kerja Sama
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Perjanjian Kerja Sama		Persentase
		Yang diprakarsai	Yang ditandatangani	
1	2	3	4	5
1	2022	16	16	100,00
2	2023	15	15	100,00
3	2024	14	14	100,00
4	2025	33	33	100,00
Jumlah		78	78	100,00

Sumber : Bagian Kerja Sama Setda, 2025

7. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh usulan kebijakan bidang perekonomian dikali 100%. Pada tahun 2025, realisasi dan capaian indikator ini adalah 100% kategori kinerja BAIK.



Kebijakan strategis bidang perekonomian yang dilaksanakan tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
2. Kebijakan terkait kegiatan operasi pasar murah sembako.
3. Survei stok ketersediaan barang kebutuhan pokok.
4. Monitoring harga barang dan jasa.

8. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang **penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan**.

Jumlah kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2025, yaitu:

a. Bidang Pengendalian:

1. Instruksi Bupati Manggarai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Akselerasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.
Instruksi ini mengatur seluruh tahapan pelaksanaan urusan Pembangunan pada APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini juga sudah mencakup 7 urusan bidang Pembangunan.
2. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 323 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 324 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026.
4. Keputusan Bupati Manggarai Nomor 172 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick wins*) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.



b. Bidang Evaluasi

Kebijakan yang diambil pada bidang evaluasi adalah berupa Surat-surat penegasan dan undangan rapat-rapat evaluasi pelaksanaan Pembangunan, yaitu: (1) Surat penegasan tentang pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK); (2) Surat undangan rapat evaluasi penyerapan APBD secara keseluruhan yang dilaksanakan per Triwulan. Surat-surat tersebut sudah mencakup 7 (tujuh) urusan bidang Pembangunan.

c. Jumlah seluruh urusan Bidang Pembangunan

Sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, urusan bidang Pembangunan terdiri dari 7 (tujuh) urusan, yaitu:

1. Bidang Infrastruktur, mencakup: Pembangunan jalan, jembatan, air minum bersih, Pembangunan/rehabilitasi sekolah-sekolah, dan irigasi.
2. Bidang Kesehatan, mencakup: penanganan stunting, pengadaan Alkes dan obat-obatan, dan lain-lain.
3. Bidang Pendidikan, mencakup: peningkatan mutu Pendidikan formal dan non formal.
4. Bidang Pertanian, mencakup: bantuan benih dan pupuk, pendampingan penyuluh pertanian.
5. Bidang Peternakan, mencakup: bantuan ternak dan pendampingan penyuluh peternakan.
6. Bidang Perikanan, mencakup: bantuan benih ikan dan pendampingan penyuluh perikanan.
7. Jaminan Sosial, mencakup: penanganan dan penanggulangan bencana, Jamkesda, dan belanja bantuan sosial.

9. Indikator Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Procurement

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* merupakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan



sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya.

Pada tahun 2025, realisasi indikator sasaran ini adalah 98,97% dari target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sebesar 90,00% dengan capaian 109,97% predikat kinerja **Istimewa**. Realisasi 98,97% ini diperoleh dari jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak **1.157 paket** dari jumlah seluruh pengadaan barang/jasa melalui **penyedia** yang dilaksanakan sebanyak **1.169 paket**.

Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran ini adalah 97,71% dari target yang diperjanjikan sebesar 80,00% dengan capaian 122,13% predikat kinerja ISTIMEWA. Realisasi 91,71% ini diperoleh dari jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak **1.022 paket** dari jumlah seluruh pengadaan barang/jasa melalui **Penyedia** yang dilaksanakan sebanyak **1.046 paket**.

10. Indikator Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif

Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif diperoleh dari Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif DIBAGI Jumlah Seluruh Pengadaan KALI 100%

Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui *e-purchasing*, tender cepat dan tender.

Jumlah seluruh pengadaan adalah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pada tahun 2025, jumlah paket pengadaan dengan metode kompetitif sebanyak 563 paket dengan rincian 65 paket pengadaan dilakukan dengan metode



tender/seleksi dan sebanyak 498 paket melalui *e-Purchasing* (Kompetisi). Sedangkan jumlah seluruh pengadaan sebanyak **1.169 paket**. Berdasarkan uraian tersebut maka realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2025 sebesar 46,16% dari target 60,00% dengan capaian kinerja mencapai 80,27% predikat kinerja **Baik**.

Pada tahun 2024, jumlah paket pengadaan dengan metode kompetitif sebanyak 563 Paket dengan rincian 91 paket pengadaan dilakukan dengan metode tender/seleksi dan 472 paket melalui *e-purchasing*. Sedangkan jumlah seluruh pengadaan sebanyak **1.046 paket**. Berdasarkan uraian tersebut maka realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2024 adalah 53,82% dari target 60,00%, maka tingkat capaian kinerjanya 89,71% kategori kinerja BAIK.

Tabel 3.19
Paket Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-Procurement</i>	Metode Kompetitif		Non Kompetitif (Pengadaan Langsung & Penunjukan Langsung)	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	PHK
			Tender	<i>e-purchasing</i>			
1	2022	583	215	-	368	8	-
2	2023	907	158	125	624	6	1
3	2024	1.046	91	472	483	9	-
4	2025	1.157	65	498	594	9	-

Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Adm. Pembangunan, 2025

11. Indikator Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan diperoleh dari Jumlah Nilai Belanja Operasi dan Modal yang Melalui Pengadaan DIBAGI Total Belanja Operasi dan Modal KALI 100%.

Tahun 2025, jumlah belanja langsung melalui pengadaan sebesar Rp496.665.985.679,00, sementara total nilai belanja langsung yang diperoleh dari Belanja Operasi (Non Belanja Pegawai) dan Belanja Modal sebesar Rp1.094.359.112.772,00. Dengan demikian realisasi dari indikator **Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan** adalah 45,38% dari target 45,00% maka capaiannya 100,85% kategori kinerja **ISTIMEWA**.



Pada tahun 2024 jumlah belanja langsung melalui pengadaan sebesar Rp482.008.449.821,00; sementara total nilai belanja langsung yang diperoleh dari Belanja Operasi (Non Belanja Pegawai) dan Belanja Modal sebesar Rp1.070.616.561.453,00. Dengan demikian realisasi dari indikator **Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan** adalah 45,02% dari target 45,00% maka capaiannya 100,05 kategori kinerja **ISTIMEWA**.

Tabel 3.20
Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan
Tahun 2022-2025

No	Tahun	Belanja Langsung (Belanja Operasi (Non Belanja Pegawai) + Belanja Modal)	Belanja Langsung melalui Pengadaan	Rasio (%)	Ket.
1	2022	472.551.934.741,00	185.543.756.264,00	39,26	
2	2023	695.939.572.479,00	369.318.262.383,00	53,07	
3	2024	1.070.616.561.453,00	482.008.449.821,00	45,02	
4	2025	1.094.359.112.772,00	496.665.985.679,00	45,38	
Total		3.333.467.181.445,00	1.533.536.454.147,00	46,00	

Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa, 2025

12. Indikator Persentase Penyelesaian Persoalan Pengelolaan SDA sesuai Ketentuan

Realisasi indikator sasaran ini adalah 100% kategori kinerja BAIK, dimana pada tahun 2025 terdapat persoalan pengelolaan SDA. Persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan yaitu:

1. Persoalan terkait kelangkaan BBM (Pertalite, Solar dan Pertamax) yang ada di setiap SPBU.
2. Persoalan terkait penerbitan surat rekomendasi Xstar untuk pembelian JBT dan JBKP bagi usaha Pertanian, Perikanan dan usaha mikro.
3. Persoalan terkait masalah air minum bersih.



Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai LPPD	Nilai	3.8351 (Tinggi)	2.8113 (Sedang)	73,30	4.0951 (Tinggi)	68,65
2	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	90,00	98,97	109,97	90,00	109,97
10	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	48,16	80,27	60,00	80,27
11	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,38	100,85	50,00	90,76
12	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata					97,03		95,80
Kategori					BAIK		BAIK

Berdasarkan tabel 3.20 tersebut di atas, realisasi indikator kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 maka rata-rata capaiannya adalah 95,80% predikat kinerja **BAIK**.



Sasaran “**Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah**” tersebut dicapai melalui program dan anggaran sebagai berikut:

Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama, Bagian Kesra, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian PBJ dan Bagian Perekonomian dan SDA					
No	Nama Program		Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1.474.022.386,00	1.425.571.866,00	96,71
2	Program Perekonomian dan Pembangunan		390.721.348,00	346.633.858,00	88,72
Total Anggaran			1.864.743.734,00	1.772.205.724,00	95,04

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah** sebesar Rp1.864.743.734,00 realisasi Rp1.772.205.724,00 atau 95,04%.

TUJUAN 2

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat

Target 83,50 (B) → Realisasi 85,10 → Capaian Kinerja 101,92% → ISTIMEWA

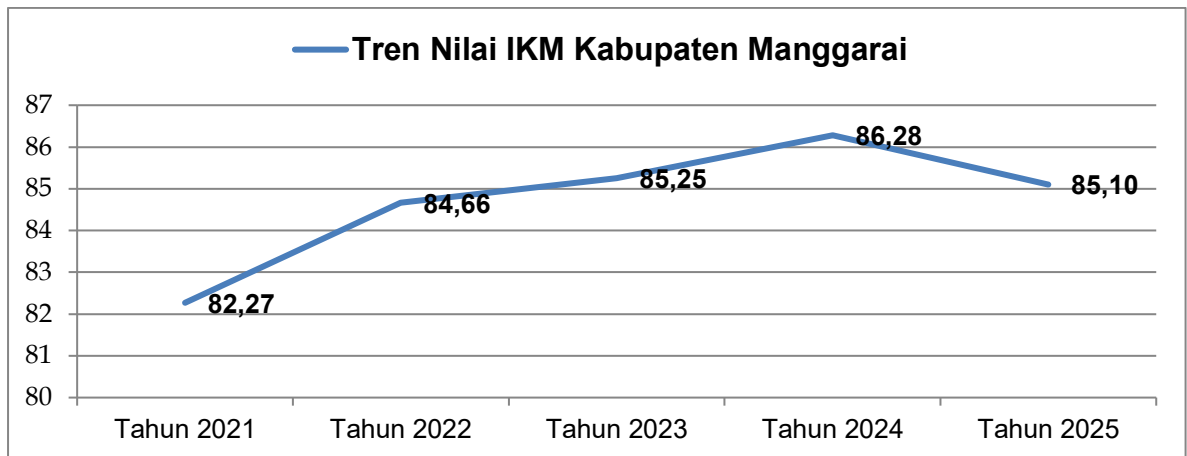
Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Manggarai diperoleh dari rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah/Unit Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2025, rata-rata nilai IKM Perangkat Daerah/Unit Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebesar 85,10 dari target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan sebesar 83,50 dengan tingkat capaian kinerja 101,92% predikat kinerja **Istimewa**.

Sementara pada tahun 2024, rata-rata nilai IKM hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah/unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai mencapai 86,28 dari target 82,50 dengan tingkat capaian 104,59% kategori kinerja ISTIMEWA.



Tren rata-rata nilai IKM Pemerintah Kabupaten Manggarai hasil SKM Perangkat Daerah/Unit Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik selama tahun 2021-2025 seperti yang tersaji dalam grafik berikut.



Berdasarkan grafik tersebut di atas, nilai IKM Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam kurun waktu 2021-2024 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2025 mengalami penurunan sehingga perlu dianalisa penyebab terjadinya penurunan tersebut.

Dalam pencapaian tujuan ***Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima***, didukung oleh Sasaran Strategis, yaitu:

SASARAN 3 : MENINGKATNYA SISTEM PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tabel 3.22
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32	68,42	93,32	86,65	73,68	85,04
Rata-Rata					93,31			85,04
Kategori Kinerja					BAIK			BAIK

Sasaran “***Meningkatnya Sistem Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik***” diukur menggunakan sebuah indikator yaitu:



1. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal Kategori Baik

Perhitungan realisasi dari indikator sasaran ini diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah/Unit Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM dan memperoleh nilai IKM minimal baik dibagi jumlah Perangkat Daerah/Unit Organisasi wajib SKM.

Pada tahun 2022-2025 jumlah Perangkat Daerah/Unit Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah melaksanakan SKM dan memperoleh nilai IKM minimal baik sebanyak 14 Perangkat Daerah/Unit Organisasi atau 73,68% dari 19 Perangkat Daerah/Unit Organisasi Wajib SKM. Realisasi 73,68% dari target 86,65% maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 85,04% predikat kinerja **BAIK**.

Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2022-2024, terdapat 13 Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah melaksanakan SKM dari 19 Perangkat Daerah. Dari 13 Perangkat Daerah yang melakukan SKM tersebut semuanya memiliki Nilai IKM Baik atau 68,42%. Realisasi 68,42% dari target 73,32% maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini pada tahun 2024 adalah 93,32% kategori kinerja BAIK.

Tabel 3.23
Nilai dan Kategori Hasil Pelaksanaan SKM Unit Pelayanan Publik
Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2025

No	Nama Perangkat Daerah	HASIL PELAKS. SKM UPPP			Tahun Pelaksanaan SKM	Ket.
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan		
1	Dinas PPO	93,80	A	Sangat Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
2	Dinas Sosial	91,00	A	Sangat Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
3	Dinas PMPTSP	89,98	A	Sangat Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,33	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
5	Dinas Kearsipan	84,88	B	Baik	Semester I	Lap. SKM



No	Nama Perangkat Daerah	HASIL PELAKS. SKM UPPP			Tahun Pelaksanaan SKM	Ket.
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan		
	dan Perpustakaan				(Januari-Juni) 2025	Semester I 2025
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	82,03	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
7	RSUD Ruteng	89,48	A	Sangat Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
8	Kecamatan Langke Rembong	82,64	B	Baik	Tahun 2024 (Januari-Desember) 2024	Lap. SKM Tahun 2024
9	Kecamatan Lelak	82,64	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
10	Kecamatan Ruteng	87,01	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
11	Kecamatan Satar Mese	82,26	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
12	Kecamatan Cibal	86,69	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
13	Kecamatan Reok	78,03	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2025	Lap. SKM Semester I 2025
14	Kecamatan Satar Mese Barat	94,02	A	Sangat Baik	Tahun 2022 (Januari-Desember) 2022	Lap. SKM Tahun 2022
15	Kecamatan Reok Barat	-	-	-	-	Belum SKM
16	Kecamatan Cibal Barat	-	-	-	-	Belum SKM
17	Kecamatan Wae Ri'i	-	-	-	-	Belum SKM
18	Kecamatan Rahong Utara	-	-	-	-	Belum SKM
19	Kecamatan Satar Mese Utara	-	-	-	-	Belum SKM
Jumlah PD/Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib SKM						19
Jumlah PD/Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM						14
Jumlah PD/Unit Kerja yang sudah SKM dan memiliki Nilai IKM Baik						14
% PD yang memiliki Nilai IKM minimal Baik = 14/19						73,68%

Sumber : Bagian Organisasi, 2025

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan Nilai IKM Kabupaten Manggarai:



1. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tata laksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. Meningkatkan komitmen pimpinan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik seperti pelaksanaan survei IKM, sosialisasi terkait Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	86,65	73,68	85,04	100,00	73,68
Rata-rata					85,04		73,68
Kategori					BAIK		CUKUP

Realisasi indikator kinerja tahun 2025 sebesar 73,68% ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 sebesar 100,00% diperoleh tingkat capaian sebesar 73,68 predikat kinerja **CUKUP**.

Sasaran "**Meningkatnya Sistem Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik**" tersebut dicapai melalui program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

Bagian Organisasi Setda				
No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		34.160.000,00	33.925.000,00	99,31
Kegiatan Penataan Organisasi		34.160.000,00	33.925.000,00	99,31
1	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.345.000,00	2.345.000,00	100,00
2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	31.815.000,00	31.580.000,00	99,26
Total Anggaran		34.160.000,00	33.925.000,00	99,31



Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran **Meningkatnya Sistem Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik**, dialokasikan anggaran sebesar Rp34.160.000,00, realisasi Rp33.925.000,00 atau 99,31%.

Terkait kualitas dan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Manggarai, Kementerian PANRB dan Ombudsman RI telah melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.25
Hasil Penilaian Kualitas dan Kepatuhan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Uraian	Nilai/Kategori		Keterangan
1	2021	Kualitas Pelayanan Publik	2,36	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	61,00	CUKUP (zona Kuning) kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
2	2022	Kualitas Pelayanan Publik	2,81	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	75,59	CUKUP (zona Kuning) kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
3	2023	Kualitas Pelayanan Publik	2,90	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	70,99	CUKUP (zona Kuning) kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
4	2024	Kualitas Pelayanan Publik	3,78	BAIK	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	83,22	Baik (Zona Hijau) Kualitas Tinggi	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
5	2025	Kualitas Pelayanan Publik	3,08	B- (Baik dengan Catatan)	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			Hasil Penilaian belum disampaikan oleh Ombudsman RI

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2025

Sesuai tabel tersebut di atas, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Manggarai tahun 2025 mencapai 3,08 atau termasuk dalam kategori B- (baik dengan catatan).



Faktor yang mempengaruhi nilai IPP Kabupaten Manggarai berada pada kategori BAIK tersebut antara lain karena Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai telah secara rutin membangun komunikasi, menyampaikan informasi dan melakukan pendampingan terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menjadi lokus penilaian dalam PEKPPP nasional maupun mandiri tahun 2025.

Namun, nilai IPP tahun 2025 sebesar 3,08 ini mengalami penurunan dari nilai IPP tahun 2024 yaitu 3,78. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Informasi mengenai PEKPPP dari Kementerian PANRB terlambat disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Manggarai, sehingga persiapan UPP menjadi kurang maksimal.
2. Pada tahun 2025 terjadi perubahan penilaian PEKPPP secara nasional yang melibatkan 2 (dua) UPP dan secara mandiri melibatkan minimal 25,00% dari jumlah UPP. Sementara pada tahun 2024 hanya dilakukan secara nasional yang melibatkan 2 (dua) UPP. Perubahan penilaian dengan terjadinya peningkatan jumlah UPP mandiri ini menyebabkan persiapan dari UPP tersebut kurang maksimal yang mengakibatkan terjadinya penurunan hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai tahun 2025.

Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berupa IPP di Kabupaten Manggarai, maka solusi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manggarai sebagai koordinator harus lebih cepat dan tepat waktu dalam menyebarluaskan informasi kepada UPP serta rutin melakukan pendampingan terhadap UPP yang menjadi lokus PEKPPP baik secara nasional maupun mandiri.
2. Setiap UPP yang telah dilakukan evaluasi pada tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai wajib menyiapkan dan mengupdate semua data dukung untuk PEKPPP tahun berikutnya, berdasarkan PEKPPP tahun sebelumnya.

3.4 INOVASI SEKRETARIAT DAERAH

Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.



Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a) peningkatan Pelayanan Publik; b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c) peningkatan daya saing Daerah.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai menargetkan 10 inovasi. Target 10 inovasi tersebut disesuaikan dengan jumlah bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai. Namun sampai dengan akhir tahun 2025, hanya 6 (enam) bagian yang memiliki/menetapkan inovasi dari 10 bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai.

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah	Inovasi	10	7	70,00

Adapun inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.26
Data Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja	Nama Inovasi	Status Inovasi
1	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	CERDAS (Cepat, Efektif, Ramah dan Sempel	Berlanjut, Perlu Pembaharuan
			Reis Meka	Replikasi dari Inovasi Puspita Dinas PMPTSP
		Bagia Adm. Pembangunan	Si-Molas (Sistem Informasi Lapangan yang Sinergis)	Inisiatif
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa	KOIN BAJA (Media Center Konsultasi dan Informasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)	Inisiatif



No	Perangkat Daerah	Unit Kerja	Nama Inovasi	Status Inovasi
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI-PROKOPIIM (Sistem Informasi Protokol Pimpinan)	Inisiatif
		Bagian Pemerintahan	SILAPAT LKPj (Sistem Lapor Cepat LKPj)	Inisiatif
		Bagian Hukum	E-Pande Aturan (Sistem Informasi Penyusunan Regulasi Daerah)	Inisiatif

Sumber : Bapperida Kab. Manggarai, 2025

Sesuai tabel tersebut di atas, Bagian yang belum memiliki inovasi tahun sampai dengan tahun 2025 adalah Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum dan Bagian Kerja Sama.

Beberapa keunggulan dengan adanya inovasi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan membuat layanan lebih cepat dan efisien.
2. Layanan menjadi lebih transparan, mengurangi peluang pungli, dan meningkatkan kepercayaan penerima layanan.
3. Memungkinkan proses administratif berjalan lebih efisien, menghemat biaya operasional, dan memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang ada.
4. Mendorong aparatur untuk lebih proaktif, responsif, dan inovatif dalam memecahkan masalah (bukan sekadar menjalankan rutinitas).

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan *good and clean governance*. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi.

3.5.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

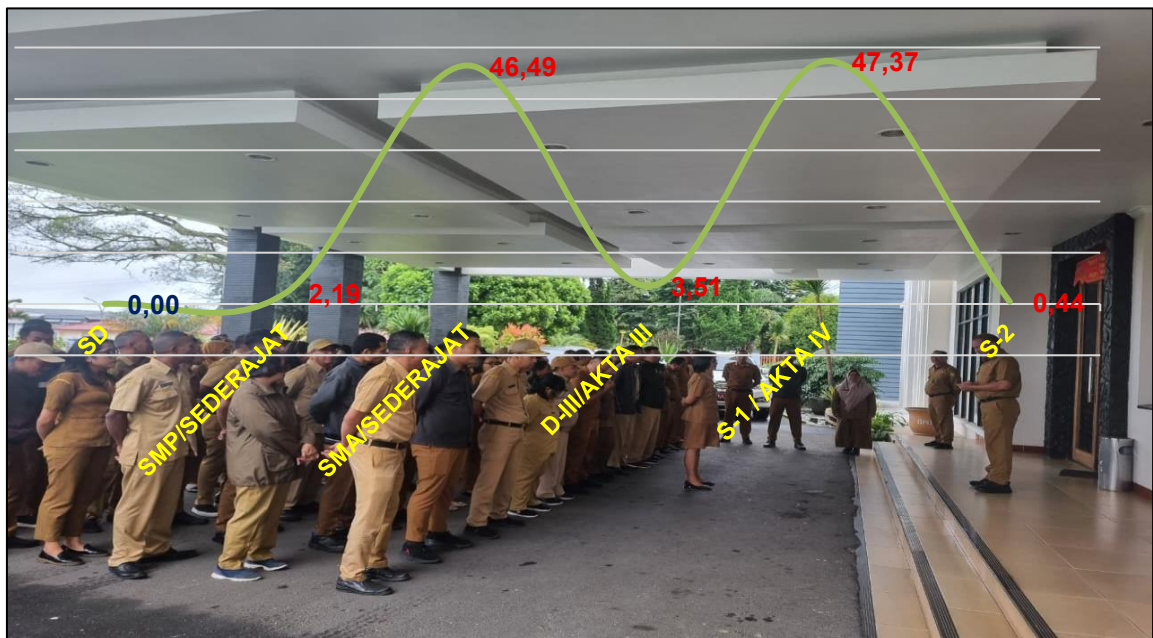
ASN Lingkup Setda Kabupaten Manggarai sampai 31 Desember 2025 berjumlah 228 orang, yang terdiri dari PNS/CPNS berjumlah 114 orang atau (50,00%), PPPK sebanyak 91 orang atau (39,91%) dan Tenaga Honorer 23 orang atau

(10,09%). Adapun komposisi ASN Lingkup Setda Kabupaten Manggarai menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	ASN		Honorrer	Jumlah	%
		PNS	PPPK			
1	2	3	4	5	6	7
1.	SD	0	0	0	0	0,00
2.	SMP /Sederajat	1	3	1	5	2,19
3.	SMA/Sederajat	34	60	12	106	46,49
4.	Diploma III/Akta III	7	1	0	8	3,51
5.	S-1/Akta IV	71	27	10	108	47,37
6.	S-2	1	0	0	1	0,44
7.	S-3	0	0	0	0	0,00
JUMLAH		114	91	23	228	100,00

Grafik 3.1
Kondisi Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2025



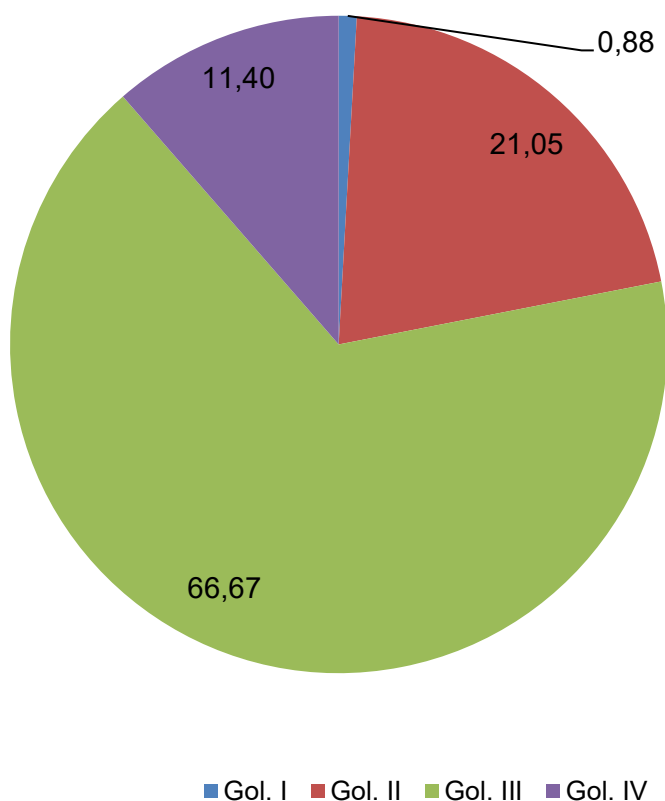
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas, komposisi Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025, didominasi oleh tingkat pendidikan S-1/Akta IV yang mencapai 47,37% disusul tingkat pendidikan SMA/Sederajat yang mencapai 46,49% dan Diploma III/Akta III mencapai 3,51%.



b. Jumlah PNS/CPNS menurut Golongan sebagai berikut:

GOLONGAN		RUANG					
		A	B	C	D	JUMLAH	%
1	I	0	0	0	1	1	0,88
2	II	0	3	6	15	24	21,05
3	III	44	10	6	16	76	66,67
4	IV	5	4	4	0	13	11,40
JUMLAH						114	100,00

Diagram 3.1
Komposisi Pegawai (PNS) menurut Golongan
Tahun 2025



Jumlah PNS/CPNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 sesuai tabel diagram tersebut di atas sebanyak 114 orang dengan komposisi didominasi oleh PNS/CPNS golongan III sebanyak 76 orang atau 66,67%, golongan II sebanyak 24 orang atau 21,05%, golongan IV sebanyak 13 orang atau 11,40% dan golongan I sebanyak 1 orang atau 0,88%.



3.5.2 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025

Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran perubahan sebesar Rp21.844.134.187,00; realisasi Rp20.396.098.547,00 atau 93,37% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27
Realisasi APBD
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2025

NO	BAGIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bagian Pemerintahan	395.826.000,00	387.760.393,00	97,96
2	Bagian Hukum	379.130.985,00	353.578.064,00	93,26
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.019.554.025,00	991.223.004,00	97,22
4	Bagian Kerja Sama	142.975.000,00	139.831.240,00	97,80
5	Bagian Adm. Pembangunan	148.306.348,00	140.808.051,00	94,94
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	864.960.000,00	782.667.934,00	90,49
7	Bagian Perekonomian dan SDA	155.826.348,00	154.897.975,00	99,40
8	Bagian Organisasi	359.030.000,00	353.651.626,00	98,50
9	Bagian Umum	18.036.013.109,00	16.792.602.939,00	93,11
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	342.512.372,00	299.077.321,00	87,32
Jumlah		21.844.134.187,00	20.396.098.547,00	93,37

3.5.3 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.340.345.818,00	3.298.128.299,00	98,74



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.005.500,00	12.005.500,00	100,00
	Kegiatan: Penataan Organisasi	190.845.600,00	190.695.600,00	99,92
	Kegiatan: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	911.278.496,00	907.440.116,00	99,58
	Kegiatan: Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.049.000.000,00	2.047.500.040,00	99,93
	Kegiatan: Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	177.216.222,00	140.487.043,00	79,27
Total Anggaran Sasaran 1		3.340.345.818,00	3.298.128.299,00	98,74
Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.474.022.386,00	1.425.571.866,00	96,71
	Program: Perekonomian dan Pembangunan	390.721.348,00	346.633.858,00	88,72
Total Anggaran Sasaran 2		1.864.743.734,00	1.772.205.724,00	95,04
Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.160.000,00	33.925.000,00	99,31
	Kegiatan: Penataan Organisasi	34.160.000,00	33.925.000,00	99,31
	Sub Kegiatan: Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.345.000,00	2.345.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	31.815.000,00	31.580.000,00	99,26
Total Anggaran Sasaran 3		34.160.000,00	33.925.000,00	99,31
Jumlah		5.239.249.552,00	5.104.259.023,00	97,42

Ket. Anggaran yang disajikan dalam tabel di atas merupakan anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan strategis yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja sasaran pada Setda Tahun 2025.

3.5.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2025.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

- Efektif apabila target kinerja sasaran tercapai.
- Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **efisien** dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **tidak efisien**.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien / Tidak Efisien
1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	100,43	Efektif	98,74	Efisien
2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	97,03	Tidak Efektif	95,04	Efisien
3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	85,04	Tidak Efektif	99,31	Tidak Efisien
Rata-rata		94,17	Tidak Efektif	97,42	Tidak Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.28 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program/kegiatan/subkegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran **94,17%** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program-program/kegiatan-kegiatan strategis sebesar **97,42%**, menunjukkan penggunaan anggaran di lingkungan Setda Kabupaten Manggarai **TIDAK EFEKTIF** dan juga **TIDAK EFISIEN**. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang tidak diikuti dengan penyesuaian target pada indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan sebuah pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dikelompokkan ke beberapa kategori tertentu. Kategori capaian menunjukkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mempunyai beberapa prinsip dan salah satunya adalah **akuntabilitas**. Prinsip ini membuka ruang adanya control masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kontrol tersebut harus direspons dengan baik oleh pemerintah. LKIP ini dibuat untuk merespons kontrol masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah memperlihatkan capaian kinerja yang **BAIK** atas sasaran-sasaran strategisnya. Uraian terinci atas ketiga sasaran dimaksud dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2025

No.	Sasaran	Tahun 2025	
		Nilai Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	100,43	ISTIMEWA
2.	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	97,03	BAIK
3.	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	85,04	BAIK
RATA-RATA		94,17	BAIK

Tabel 4.1 di atas menegaskan bahwa pada tahun 2025:

- Kinerja **ISTIMEWA** mencakup 1 (Satu) sasaran atau 33,33% yaitu:
 - Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja.
- Kinerja **BAIK** mencakup 2 (Dua) sasaran atau 66,67% yaitu:
 - Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah.



b. Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik

Terhadap capaian indikator yang belum mencapai target, dan untuk mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Pengalokasian dan/atau rasionalisasi anggaran yang dilakukan di setiap Bagian Lingkup Setda Kabupaten Manggarai agar memperhatikan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung IKU Sekretariat Daerah.
2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar dilakukan sesuai dengan Instruksi Bupati Manggarai tentang Akselerasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dikeluarkan setiap tahun.
3. Menginstruksikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mempercepat program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.
4. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tata laksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.

Jika laporan ini belum bisa memenuhi harapan, dengan rendah hati disampaikan permohonan maaf. Kritikan yang berbobot dan konstruktif untuk bekerja LEBIH BAIK di hari esok sangat diharapkan. Bekerja lebih baik tidak sekadar untuk mendapatkan sebuah LKIP dengan predikat ISTIMEWA, Baik, Cukup ataupun Kurang, tetapi terutama untuk mewujudkan ***Manggarai yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan dan Berdaya Saing.***

Ruteng, 26 Januari 2026

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



LAMBERTUS PAPUT

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)
1.1.	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	73,17
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00
-	-	Peringkat EKKPD	Peringkat	Sangat Tinggi
1.2.	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.8351 (Tinggi)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	90,00
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	100,00
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50
2.1	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	86,65

Ruteng, 14 Oktober 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

LAMBERTUS PAPUT, S.SOS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660917 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Lambertus Paput, S.Sos**

Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herybertus G. L. Nabit, SE, MA**

Jabatan : Bupati Manggarai

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 14 Oktober 2025

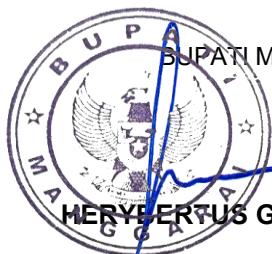
Pihak Kedua
BUPATI MANGGARAI,
HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Pihak Pertama
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,
LAMBERTUS PAPUT, S. SOS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660917 198603 1 006

Lampiran PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)
1.1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	73,17
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00
-	-	Peringkat EKKPD	Peringkat	Sangat Tinggi
1.2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.8351 (Tinggi)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	90,00
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	100,00
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50
2.1	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	86,65
No	Uraian		Satuan	Target
1	Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah		Inovasi	10

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Keg./Sub Keg. Strategis)	3.374.505.818,00	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.005.500,00	APBD
	Kegiatan Penataan Organisasi	225.005.600,00	APBD
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	177.216.222,00	APBD
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	911.278.496,00	APBD
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.049.000.000,00	APBD
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.474.022.386,00	APBD
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	390.721.348,00	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Keg. /Sub Keg. Pendukung)	16.604.884.635,00	APBD
TOTAL		21.844.134.187,00	APBD



SUPATI MANGGARAI,

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 14 Oktober 2025



PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

AMBERTUS PAPUT, S.SOS

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660917 198603 1 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	Nilai SAKIP	Angka	67,50 (B)	64,81	96,01
		Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	73,17	74,42	101,71
			Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
		Rata-rata Sasaran 1					100,43
		Predikat Kinerja				ISTIMEWA	
		-	Peringkat EKKPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,47)	2,8113 (Sedang)	62,89
		Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.8351 (Tinggi)	2.8113 (Sedang)	73,30
			Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
			Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	90,00	98,97	109,97
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	48,16	80,27
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,38	100,85
			Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	100,00	100,00	100,00
		Rata-rata Sasaran 2					97,03
		Predikat Kinerja					BAIK
2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,50	85,10	101,92
		Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	86,65	73,68	85,04
		Rata-rata Sasaran 3					85,04
		Kategori					BAIK
Rata-rata Sasaran 1 + 2 + 3							94,17
Predikat Kinerja							BAIK
1	Uraian			SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah			Inovasi	10	7	70,00

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
NO	PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	KET	REALISASI		%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Keg./Sub Keg. Strategis)		3.374.505.818,00	APBD-P	3.332.053.299,00		98,74
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1.474.022.386,00	APBD-P	1.425.571.866,00		96,71
3	Program Perekonomian dan Pembangunan		390.721.348,00	APBD-P	346.633.858,00		88,72
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Keg. /Sub Keg. Pendukung)		16.604.884.635,00	APBD-P	15.291.839.524,00		92,09
TOTAL			21.844.134.187,00	APBD-P	20.396.098.547,00		93,37

RUTENG, 26 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH,


LAMBERTUS PAPUT, S.SOS
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660917 198603 1 006



*Manggarai Sejahtera, Bersih,
Berkelanjutan, dan Berdaya Saing*

